

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
DI JAWA TENGAH**



SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat untuk Mencapai
Gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Disusun Oleh :

RATRI PATRIATI

NIM. F0306068

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA**

2010

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI JAWA TENGAH

Telah disetujui dan diterima oleh pembimbing untuk diajukan kepada tim penguji skripsi.

Surakarta, 29 Desember 2010

Disetujui dan diterima oleh

Pembimbing



Drs. Jaka Winarna, MSi., Ak.

NIP 196609191992031001

commit to user

HALAMAN PENGESAHAN

Telah disetujui dan diterima dengan baik oleh tim penguji skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret guna melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi.

Surakarta, Januari 2011

Tim Penguji Skripsi

1. Drs. Jaka Winarna, MSi., Ak.

NIP 196609191992031001

Pembimbing (.....)

2. Drs. Nurmadi Harsa S., M.Si, Ak.

NIP 19651211200003001

3. Drs. Sri Hartoko, MBA. Ak.

NIP 196107111987031001

(.....)

(.....)

MOTTO

***“Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah (pula) kamu bersedih hati,
padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi (derajadnya) jika kamu
orang-orang yang beriman”***

(QS Ali Imran : 39)

*“Apabila engkau melakukan kekeliruan, belajarliah darinya. Kemudian
biarkan ia pergi setelah mengambil pelajaran darinya.”*

(Dr. 'Aidh Al-Qarni)

“berani lah bermimpi , karena Tuhan akan memeluk mimpi kita”
(anonym)

PERSEMBAHAN



Saya persembahkan penelitian ini untuk:

KELUARGA BESAR AMOS SOETOJO

MASA DEPAN DAN IMPIANKU

semoga bisa memberikan sedikit kebanggaan, amiin.

commit to user

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaykum Wr. Wb.

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, karunia, segala nikmat, dan kekuatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Jawa Tengah**”, sebagai tugas akhir guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Sebelas Maret.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini tidak terlepas dari dorongan dan bantuan banyak pihak. Oleh karenanya, penulis dengan ini mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Bambang Sutopo, M.Com., Ak., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret.
2. Drs. Jaka Winarna M.Si., Ak., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret sekaligus pembimbing skripsi, atas semua kritik, saran, dan perhatiannya yang sangat membantu penulis untuk mencapai hasil yang terbaik.
3. Agus Widodo SE., MSi., Ak., selaku Pembimbing akademik.
4. Bapak, Ibu, dan enam saudaraku tersayang, *matur nuwun sanget*, untuk semua doa dan dukungan dari kalian, semua yang kalian katakan *is magic*.

commit to user

5. Keluarga besar di Solo, Bude Dirin, Pakde Sarjono, Bude In, Lik Wal, Bulik Ning, atas penjagaan, perlindungan, dan perawatan di kala saya sakit, *matur nuwun sanget*.
6. Pakde Agfa, terima kasih telah mengenalkan tujuan hidup, kerja keras, dan tanggung jawab, *sekarang mari mengejar mimpi kita!!*
7. Dhika Arif Hanantyo, untuk semangat, waktu, dan kepercayaan yang Gi berikan, *arigato*.
8. Ita, Boim, Soun, akhirnya saya sampai pada titik ini, hinaan serta cacian kalian seperti sengatan listrik tegangan tinggi yang membangunkan saya dari kemalasan yang berkepanjangan hingga pada akhirnya skripsi ini saya selesaikan, *thanks alot a million*.
9. Wi'de, Yanti, Pepel, Mba Phix, *all Fortuna 2006/2007*, kisah kita meski singkat namun begitu membekas, *luph u all*.
10. Budewi dan Bibeh "*Trio Menthog*", kalian adalah sumber inspirasi yang menguatkan saya, kebersamaan kita adalah anugrah yang luar biasa indah.
11. Kuntet, Madun, dan seluruh personil *bautiful princess @second floor*, terima kasih telah menghibur ketika saya tengah merasa lelah.
12. Bantal, Tulang, Pinik, Yesi, Ika, Dhinul, Ririn, untuk semua hal nakal yang kita lakukan (titip absen, tidur di kelas, contek-contekan), kalian adalah dosa termanis, *mari membuat keributan!!*
13. Teman-teman Akuntansi 2006, *who is the best? Accounting society*.
14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

commit to user

Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak yang memiliki ketertarikan dengan penelitian ini sangat penulis harapkan demi perbaikan yang berkelanjutan.

Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan di kemudian hari. Terima kasih.

Wassalamu' alaykum Wr.Wb.



Surakarta, Desember 2010

Ratri Patriati

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAKSI	ii
ABSTRAC	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
BAB II. TELAAH PUSTAKA	11
A. Laporan Keuangan dan Tujuan Laporan Keuangan	11
B. Jenis Laporan Keuangan	12
C. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	16

D. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	19
E. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	19
F. Gambaran Umum Jawa Tengah	21
G. Rerangka Pemikiran	22
H. Hipotesis	22
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN.....	31
A. Desai Penelitian	31
B. Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel	31
C. Sumber Data	33
D. Devinisi Operasional Dan Pengukuran Variabel.....	33
1. Operasionalisasi Variabel	33
2. Variabel Dependen	33
3. Variabel Independen	35
E. Teknik Analisis Data	38
F. Pengujian Data	39
1. Analisis Faktor	39
2. Uji Asumsi Klasik	40
3. Pengujian Hipotesis	42
BAB IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....	45
A. Deskripsi Data	45
B. Hasil dan Analisis Data	47
1. Analisis Deskriptif Statistik Atas Data	48
2. Analisis Faktor	49

commit to user

3. Uji Asumsi Klasik	50
4. Uji Hipotesis	56
5. Pembahasan	61
BAB V. KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN.....	65
A. Kesimpulan	65
B. Keterbatasan	66
C. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN	71



DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
1	Sampel Penelitian	46
2	Deskripsi Statistik Data Penelitian.....	48
3	Analisis Faktor.....	50
4	Normalitas Data.....	51
5	Uji Multikolinieritas	53
6	Uji Multikolinieritas setelah CAP dikeluarkan.....	54
7	Uji Autokorelasi	55
8	Uji Heteroskedastisitas	56
9	Uji Signifikansi-F (Kelayakan Model Regresi).....	57
10	Uji Signifikansi-t.....	59
11	Uji Koefisien Determinasi.....	60

DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
1	Kerangka Pikir Penelitian.....	22



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Data Sampel	71
------------	-------------------	----



**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
DI JAWA TENGAH**

ABSTRAKSI

RATRI PATRIATI

F0306068

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah di Jawa Tengah. Penelitian dilakukan dengan menguji pengaruh *revenue*, *expenditure*, *real estate*, *capital*, *taxes*, *grant*, *population* dan *tourist* sebagai variabel independen, terhadap kinerja keuangan sebagai variabel dependen yang diprosikan dengan *factor score* dari rasio kemandirian, rasio efisiensi, dan rasio efektivitas.

Populasi penelitian ini adalah seluruh pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Tengah dengan sampel penelitian yang dipilih berdasarkan *purposive sampling method*. Penelitian ini menggunakan jumlah sampel 70 pemerintah daerah. Penelitian ini menggunakan alat analisis data regresi berganda (*multiple regression*) dengan bantuan *software* komputer untuk statistik SPSS versi 16.00. Sebanyak 8 hipotesis diuji dalam penelitian ini menggunakan analisis *multiple regression*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bukti empiris bahwa variabel *revenue* dan *expenditure* berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Jawa Tengah. Namun demikian, *real estate*, *capital*, *taxes*, *grant*, *population* dan *tourist* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Jawa Tengah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa jumlah *revenue* dan *expenditure* merupakan faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah di Jawa Tengah.

Kata kunci: kinerja keuangan, *revenue*, *expenditure*, *real estate*, *capital*, *taxes*, *grant*, *population*, *tourist*, rasio kemandirian, rasio efisiensi, rasio efektivitas, pemerintah daerah, Jawa Tengah

commit to user

**ANALYSIS OF THE FACTORS THAT AFFECT ON FINANCIAL
PERFORMANCE OF LOCAL GOVERNMENT
IN CENTRAL JAVA**

ABSTRAC

RATRI PATRIATI

F0306068

The aim of this research is to know factors which affect financial performance of local government in Central Java. This research examine affects of *revenue, expenditure, real estate, capital, taxes, grant, population* and *tourist* as independent variable, to financial performance as dependent variable which is indicated by *factor score* from self-sufficiency, efficiency, effectiveness ratio.

Population of this research is local government districts in central java with the sample chosen by purposive sampling method. This research uses a sample of 70 local governments. This research used a multiple regression analysis of data with the help of computer software for statistical 16.00 version of SPSS. 8 hypotheses were examined by regression multiple analysis.

The results of this research showed empirical evidence that the *revenue* and *expenditure* variables affect the financial performance of local government in Central Java. But, the *real estate, capital, taxes, grant, population* and *tourist* give no effect on the financial performance of local governments in Central Java. This research concludes that *revenue* and *expenditure* affect to financial performance of local government in Indonesia.

Keywords: financial performance, *revenue, expenditure, real estate, capital, taxes, grant, population, tourist*, self-sufficiency ratio, efficiency ratio, effectiveness ratio, local government, central java.

commit to user

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Otonomi daerah menurut No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan pembaharuan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan perundang-undangan. Dengan otonomi daerah berarti telah memindahkan sebagian besar kewenangan yang tadinya berada di pemerintah pusat diserahkan kepada daerah otonom, sehingga pemerintah daerah otonom dapat lebih cepat dalam merespon tuntutan masyarakat daerah sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.

Setiap pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat secara demokratis, adil, merata, dan berkesinambungan (Suprpto, 2006). Kewajiban tersebut bisa dipenuhi apabila pemerintah daerah mampu mengelola potensi daerah yaitu potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan potensi sumber daya keuangan secara optimal. Keberhasilan pengelolaan potensi daerah tersebut dapat dinilai dari kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut.

Mardiasmo (2007) menyatakan bahwa pengukuran kinerja dilakukan untuk memenuhi tiga maksud. *Pertama*, untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah. *Kedua*, untuk mengalokasikan sumber daya dan

pembuatan keputusan. *Ketiga*, untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan. Menurut Mardiasmo (2007) inti dari pengukuran kinerja organisasi pemerintah adalah *value for money*. *Value for money* merupakan konsep pendekatan pengukuran kinerja biasanya dinyatakan dengan tingkat ekonomis, efisiensi dan efektifitas. Ekonomis merupakan pengelolaan hati-hati tanpa ada pemborosan, sementara efisiensi adalah membandingkan antara jumlah *output* yang dihasilkan terhadap *input* yang digunakan, serta efektifitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan yang harus dicapai. Mahmudi (2007) dalam Suyono (2010) menyebutkan bahwa kinerja keuangan tersebut biasanya dinyatakan dengan rasio keuangan yang diidentifikasi dari laporan keuangan pemerintah daerah. Rasio keuangan ini dapat digunakan sebagai media untuk menginformasikan kinerja keuangan sebagaimana yang dinyatakan oleh Hutomo (2006), Sidik (2008), Azhar (2008) dan Rahardjo (2010) yang menggunakan kinerja keuangan sebagai variabel penelitiannya.

Suprpto (2006) melakukan analisis kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten Sleman selama masa otonomi dengan menggunakan rasio kemandirian, rasio efisiensi dan rasio efektifitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan yang diukur dengan menggunakan ketiga rasio tersebut mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Rasio efisiensi dan efektivitas juga digunakan oleh Rahardjo (2010) sebagai pengukur kinerja keuangan yang dikaitkan dengan porsi keuangan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan dari sembilan rasio keuangan *return on equity*, *return on assets*, *commit to user*

profit margin, current ratio, debt/equity, long term liabilities/total assets, assets turnover, operating revenues/total revenues dan *operating revenues/operating expense* hanya *return on equity ratio, return on assets, debt/equity ratio, long terms liabilities/assets, assets turnover ratio, operating revenues/total revenues ratio*, dan *operating revenues/operating expenses ratio* yang berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

Steven dan McGowen (1983) melakukan penelitian terkait indikator keuangan dan tren keuangan pemerintah daerah dengan menggunakan tiga buah variabel yang terdiri dari variabel pendapatan dan pengeluaran, variabel pajak dan *real estate*, dan variabel *composite* yang terbagi menjadi *debt to revenue ratio, grant to revenue ratio* serta *grant to expenditure ratio*. Hasil penelitian ini adalah bahwa tren keuangan pemerintah daerah dipengaruhi oleh banyak faktor seperti jumlah penduduk dan sumber pendapatan bagi pemerintah daerah.

Cohen (2006) mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat menjadi moderator kinerja keuangan pemerintah daerah di Yunani dengan menggunakan variabel *gross domestic product*, populasi penduduk, variabel *real estate, tourist* dan *capital*. Sementara indikator kinerja keuangan yang digunakan adalah rasio keuangan yang terbagi menjadi *return on equity, return on assets, profit margin, current ratio, debt/equity, long term liabilities/total assets, assets turnover, operating revenues/total revenues* dan *operating revenues/operating expense*. Hasil penelitian Cohen (2006) menyatakan bahwa kelima faktor yang terdiri dari *gross domestic product, commit to user*

populasi penduduk, variabel *real estate*, *tourist* dan *capital* mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah yang dinyatakan dalam sembilan rasio keuangan. Rasio profitabilitas yang dinyatakan dalam rasio ROA, ROE dan *profit margin* tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor tersebut oleh karena profitabilitas sektor pemerintah berbeda dengan sektor swasta.

Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah juga dilakukan Suyono (2010). Suyono menguji pengaruh *revenue*, *expenditure*, *real estate*, *capital*, *taxes*, dan *grant* terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia. Indikator kinerja keuangan yang digunakan adalah lima rasio keuangan, yaitu *current ratio*, *debt/equity*, *assets turnover*, *operating revenues/total revenues and operating revenues/operating expense*. Hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan signifikan *revenue* dengan kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia.

Penelitian ini menguji kembali hubungan antara *revenue*, *expenditure*, *real estate*, *capital*, *taxes*, *grant*, *population* dan *tourist* terhadap kinerja keuangan dengan tujuan untuk memperoleh bukti empiris pengaruh *revenue*, *expenditure*, *real estate*, *capital*, *taxes*, *grant*, *population* dan *tourist* terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Jawa Tengah yang diwakilkan dengan rasio kemandirian, rasio efisiensi, rasio dan rasio efektivitas.

Revenue merupakan jumlah pendapatan asli daerah oleh pemerintah daerah dalam suatu periode tertentu. Pendapatan yang semakin meningkat diharapkan bisa memenuhi kewajiban pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Suatu pemerintah daerah yang mampu
commit to user

mencapai jumlah pendapatan daerah yang tinggi tentunya akan mempunyai jumlah kas tersedia yang cukup untuk melakukan pembiayaan kegiatan program kerja yang telah dianggarkan oleh pemerintah daerah yang bersangkutan, dengan demikian akan tercipta kinerja keuangan pemerintah daerah yang baik.

Expenditure merupakan belanja rutin atau belanja operasional pemerintah daerah dalam suatu periode tertentu. Belanja tersebut dipergunakan untuk memberikan pelayanan publik sebaik-baiknya. Semakin baik pelayanan publik yang diberikan, menunjukkan semakin baik pengelolaan pembelanjaan pemerintah daerah. Pengelolaan pembelanjaan yang baik menciptakan *Value for money* yang baik, sehingga penilaian akan kinerja keuangan menjadi baik pula.

Real estate merupakan jumlah keseluruhan atas nilai tanah, gedung atau bangunan dan jalan yang dimiliki dan dilaporkan oleh pemerintah daerah pada tanggal tertentu. Semakin banyak dan semakin baik jumlah bangunan, gedung dan jalan, semakin baik pula pelayanan publik yang diberikan, semakin banyak pula pendapatan yang bisa diperoleh pemerintah daerah, dengan demikian semakin baik pula kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut.

Capital merupakan jumlah ekuitas dana pemerintah pada tanggal tertentu. Jumlah *capital* yang tinggi dapat menunjukkan bahwa pemerintah daerah mempunyai dana yang cukup untuk membiayai kegiatan operasional

pemerintah daerah sehingga mampu mencapai kinerja keuangan yang tinggi pula.

Taxes merupakan jumlah pajak yang menjadi hak pemerintah daerah dalam suatu periode tertentu. Pajak yang tinggi yang diperoleh suatu pemerintah daerah dapat menjadi sumber pendapatan bagi pemerintah daerah sehingga dapat digunakan sebagai sumber pembiayaan bagi operasional pemerintah daerah dalam rangka menghasilkan pelayanan jasa pada masyarakat. Pelayanan jasa publik yang baik secara tidak langsung menjadi indikasi kinerja keuangan pemerintah daerah yang baik pula.

Grant merupakan jumlah sumbangan, donasi, dan hadiah serta subsidi yang diterima oleh suatu pemerintah daerah pada suatu periode tertentu. Jumlah *grant* yang tinggi yang diterima oleh pemerintah akan dapat menjadi sumber pembiayaan yang cukup bagi pemerintah daerah hingga mampu menjamin kelancaran kegiatan operasional pemerintah daerah dan mampu menciptakan kinerja keuangan yang baik.

Population merupakan jumlah penduduk yang mendiami suatu wilayah tertentu. Jumlah penduduk yang banyak pada satu area tertentu meningkatkan tuntutan terhadap pemerintah untuk memberikan pelayanan publik yang jauh lebih baik lagi. Agar dapat memberikan pelayanan publik yang baik dengan jumlah penduduk yang banyak, maka pemerintah harus bisa meningkatkan kinerja keuangannya.

Tourist merupakan jumlah wisatawan yang berkunjung, baik wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara. Semakin banyak

wisatawan yang datang berkunjung dan membelanjakan uangnya maka semakin banyak pula pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah. Pendapatan yang diperoleh dari wisatawan tersebut dapat dipergunakan untuk sumber pembiayaan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajibannya memberikan pelayanan publik yang baik bagi masyarakat.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, judul dari penelitian ini adalah **“Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Jawa Tengah”**.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ada dua. *Pertama*, adanya penambahan dua variabel independen yaitu *population* dan *tourist*, kedua variabel tersebut merupakan variabel independen yang dipergunakan pada penelitian Cohen (2006). *Kedua*, Sampel yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kota atau kabupaten di Jawa Tengah. Dipilihnya Jawa Tengah sebagai sampel karena dua variabel tambahan yakni *population* dan *tourist* tidak dapat digunakan sebagai sampel oleh Suyono (2010) karena keterbatasan data yang tidak disediakan di laporan keuangan pemerintah daerah.

B. Perumusan Masalah

Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah mengenai ada/tidaknya pengaruh *revenue*, *expenditure*, *real estate*, *capital*, *taxes*, *grant*, *population* dan *tourist* terhadap kinerja keuangan, yang dapat dirumuskan sebagai berikut.

1. Apakah *revenue* berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Jawa Tengah?
2. Apakah *expenditure* berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Jawa Tengah?
3. Apakah *real estate* berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Jawa Tengah?
4. Apakah *capital* berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Jawa Tengah?
5. Apakah *taxes* berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Jawa Tengah?
6. Apakah *grant* berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Jawa Tengah?
7. Apakah *population* berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Jawa Tengah?
8. Apakah *tourist* berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Jawa Tengah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk memperoleh bukti ada tidaknya pengaruh *revenue* terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Jawa Tengah.
2. Untuk memperoleh bukti ada tidaknya pengaruh *expenditure* terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Jawa Tengah.

3. Untuk memperoleh bukti ada tidaknya pengaruh *real estate* terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Jawa Tengah.
4. Untuk memperoleh bukti ada tidaknya pengaruh *capital* terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Jawa Tengah.
5. Untuk memperoleh bukti ada tidaknya pengaruh *taxes* terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Jawa Tengah.
6. Untuk memperoleh bukti ada tidaknya pengaruh *grant* terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Jawa Tengah.
7. Untuk memperoleh bukti ada tidaknya pengaruh *population* terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Jawa Tengah.
8. Untuk memperoleh bukti ada tidaknya pengaruh *tourist* terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Jawa Tengah.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam penerapan kebijakan keuangan daerah.

2. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan tambahan pengetahuan mengenai keuangan pemerintah daerah dan bisa menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya untuk mengkaji lebih lanjut dalam topik yang sama.

3. Bagi Penulis

Penulis memperoleh tambahan wawasan, pengalaman, dan pengetahuan khususnya mengenai keuangan pemerintah daerah.



BAB II

TELAAH PUSTAKA

A. Laporan Keuangan dan Tujuan Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah suatu penyajian data keuangan termasuk catatan yang menyertainya, bila ada, yang dimaksudkan untuk mengkomunikasikan sumber daya ekonomi (aktiva) dan/atau kewajiban suatu entitas pemerintah pada saat tertentu atau perubahan atas aktiva dan/atau kewajiban selama suatu periode tertentu sesuai dengan standar akuntansi pemerintah (Suyono, 2010).

Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan (kerangka konseptual akuntansi pemerintah, paragraf 21). Tujuan Pernyataan Standar ini adalah mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*) dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan. Laporan keuangan pemerintah daerah untuk tujuan umum yang selanjutnya disebut

dengan laporan keuangan pemerintah daerah disusun dan disajikan sekurang-kurangnya setahun sekali untuk memenuhi sejumlah besar pemakai (Bastian, 2001).

Dalam Bastian (2001) disebutkan bahwa tujuan dari pelaporan keuangan umum dalam pemerintah daerah adalah menyediakan informasi yang berguna untuk tujuan pengambilan keputusan, dan untuk mendemonstrasikan akuntabilitas entitas untuk sumber daya – sumber daya terpercaya dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai sumber-sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya finansial;
2. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas mendanai aktivitasnya dan memenuhi persyaratan kasnya;
3. Menyediakan informasi yang berguna dalam mengevaluasi kemampuan entitas untuk mendanai aktivitasnya dan untuk memenuhi kewajiban dan komitmennya;
4. Menyediakan informasi mengenai kondisi finansial suatu entitas dan perubahan di dalamnya;
5. Menyediakan informasi agregat yang berguna dalam mengevaluasi kinerja entitas dalam hal kos jasa, efisiensi dan pencapaian tujuan.

B. Jenis Laporan Keuangan

Organisasi sektor publik dituntut untuk dapat membuat laporan keuangan eksternal yang meliputi laporan keuangan formal, seperti Laporan *commit to user*

Surplus/Devisit, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Aliran Kas, Neraca serta Laporan Kinerja yang dinyatakan dalam ukuran finansial dan non-finansial (Mardiasmo, 2007). Bastian (2001) menyebutkan komponen-komponen yang terdapat dalam suatu set laporan keuangan yang lengkap meliputi Laporan Posisi Keuangan, Laporan Kinerja Keuangan, Laporan Perubahan Aktiva, Laporan Arus Kas, Perhitungan Anggaran dan Catatan atas Laporan Keuangan.

a. Laporan Posisi Keuangan

Laporan posisi keuangan atau disebut juga dengan neraca atau pun laporan aktiva dan kewajiban adalah laporan keuangan yang menyajikan posisi aktiva, utang dan modal pemilik pada satu saat tertentu (Bastian, 2001). Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas dana (Suyono, 2010).

b. Laporan Kinerja Keuangan dan Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan kinerja keuangan atau disebut juga dengan Laporan Pendapatan dan Biaya, Laporan Surplus-Rugi, Laporan Operasi, Laporan Surplus Devisit atau Laporan *Profit* dan *Loss* adalah laporan keuangan yang menyajikan pendapatan dan biaya selama periode tertentu (Bastian, 2001). Laporan Kinerja Keuangan merupakan laporan realisasi pendapatan dan belanja yang disusun berdasarkan basis akrual.

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan keuangan yang menunjukkan kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan

dibandingkan dengan tahun sebelumnya (kerangka konseptual akuntansi pemerintah, paragraf 77)

c. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah pusat/daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBN/APBD. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur seperti: pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (Suyono, 2010).

d. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menyajikan informasi tentang penerimaan dan pengeluaran kas selama satu periode tertentu (Bastian, 2001).

Penerimaan dan pengeluaran kas tersebut diklasifikasikan menurut kegiatan operasi, kegiatan pendanaan dan kegiatan investasi.

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset *non-keuangan*, pembiayaan, dan *non-anggaran* (Suyono, 2010). Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas, yang masing-masing didefinisikan sebagai berikut ini.

- 1) Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Negara/Daerah.
- 2) Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Negara/Daerah.

e. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, neraca dan laporan arus kas (kerangka konseptual akuntansi pemerintah, paragraf 75). Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, catatan atas laporan keuangan sekurang-kurangnya disajikan dengan susunan sebagai berikut ini (Suyono, 2010).

- 1) Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Undang-undang APBN/Perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.
- 2) Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan.
- 3) Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.
- 4) Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

- 5) Pengungkapan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas.
- 6) Formasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.
- 7) Daftar dan skedul.

C. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Karakteristik kualitatif merupakan ciri khas yang membuat informasi dalam laporan keuangan berguna bagi pemakai. Terdapat empat karakteristik kualitatif pokok yaitu, dapat dipahami, relevan, keandalan dan dapat diperbandingkan (Bastian, 2001).

1. Dapat dipahami

Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah kemudahan untuk segera dipahami pemakai (Bastian, 2001).

2. Relevan

Agar bermanfaat informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan kalau dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, atau masa depan, menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu (Bastian, 2001). Informasi dalam laporan keuangan pemerintah dikatakan

commit to user

relevan menurut Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah Paragraf 33, jika memenuhi kriteria:

a. Manfaat umpan balik (*feedback value*).

Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.

b. Manfaat prediktif (*predictive value*).

Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

c. Tepat waktu.

Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.

d. Lengkap.

Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

3. Keandalan

Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus atau jujur dari yang seharusnya disajikan atau *commit to user*

yang secara wajar diharapkan dapat disajikan (Bastian, 2001). Informasi dalam laporan keuangan dikatakan andal menurut Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah Paragraph 35, apabila memenuhi kriteria:

a. Penyajian Jujur

Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

b. Dapat Diverifikasi

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.

c. Netralitas

Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

4. Dapat diperbandingkan

Pemakai harus dapat memperbandingkan laporan keuangan entitas lintas periode untuk mengidentifikasi kecenderungan neraca dan kinerja keuangan (Bastian, 2001). Dalam Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah Paragraph 36, disebutkan bahwa informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara eksternal maupun internal.

D. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Untuk memperoleh gambaran tentang perkembangan keuangan suatu perusahaan, perlu dilakukan suatu interpretasi atau analisis terhadap data keuangan dari perusahaan yang bersangkutan, dan data keuangan itu akan tercermin dalam laporan keuangannya. Laporan keuangan melaporkan baik posisi perusahaan pada suatu waktu tertentu maupun operasinya selama beberapa periode yang lalu. Terdapat beberapa metode dalam analisis laporan keuangan. Salah satu teknik yang paling banyak digunakan untuk menganalisis laporan keuangan adalah analisis rasio keuangan. Terdapat berbagai jenis rasio yang dapat digunakan untuk mengevaluasi dan menginterpretasikan laporan keuangan. Hasil dari perhitungan rasio-rasio keuangan perlu diinterpretasikan, sehingga darinya dapat dievaluasi kinerja keuangan organisasi dan selanjutnya dilakukan pengambilan keputusan tertentu (Suyono, 2010).

E. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah sebagai pihak yang diserahi tugas menjalankan roda pemerintahan, pembangunan, dan layanan sosial masyarakat wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah pemerintah daerah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak (*commit to user* (Suprpto, 2006). Kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan

kinerjanya dengan sendirinya dipenuhi dengan menyampaikan informasi yang relevan sehubungan dengan hasil program yang dilaksanakan kepada wakil rakyat dan juga kelompok-kelompok masyarakat yang memang ingin menilai kinerja pemerintah.

Suprpto (2006) menyebutkan salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melaksanakan analisis rasio terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya. Penggunaan analisis rasio pada sektor publik belum banyak dilakukan, sehingga secara teori belum ada kesepakatan secara bulat mengenai nama dan kaidah pengukurannya. Meskipun demikian, dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien dan akuntabel, analisis rasio terhadap APBD perlu dilaksanakan meskipun pengakuntasian dalam APBD berbeda dengan laporan keuangan yang dimiliki perusahaan swasta (Halim, 2007).

Analisis rasio keuangan pada APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui kecenderungan yang terjadi (Halim, 2004). Beberapa rasio yang dapat dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari APBD antara lain adalah sebagai berikut:

1. Rasio Kemandirian

Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.

commit to user

2. Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima.

3. Rasio Efektivitas

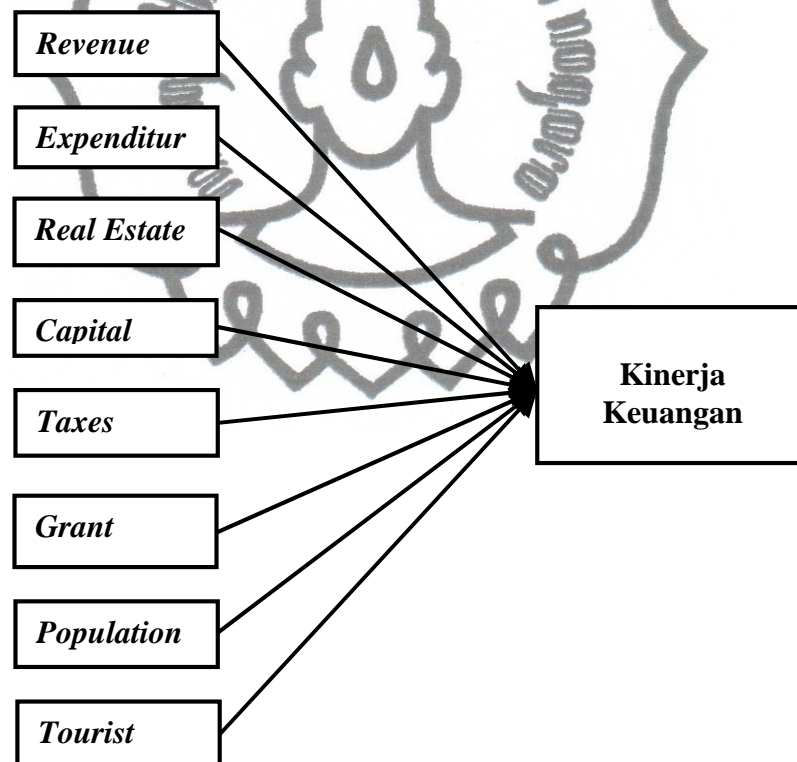
Rasio efektifitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

F. Gambaran Umum Jawa Tengah

Jawa tengah adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian tengah Pulau Jawa. Secara geografis Jawa Tengah berada pada koordinat $8^{\circ} 30' - 5^{\circ} 40'$ lintang selatan $108^{\circ} 30' - 111^{\circ} 30'$ bujur timur. Luas wilayah Jawa Tengah adalah $32.548,20 \text{ km}^2$ dengan jumlah penduduk 31.820.000 (tahun 2005). Secara administratif, Provinsi Jawa Tengah terdiri atas 29 kabupaten dan 6 kota. Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22/1999 tentang pemerintah daerah, Jawa Tengah terdiri atas 4 kota administratif, yaitu Purwokerto, Purbalingga, Cilacap dan Klaten. Setelah otonomi daerah, kota-kota administratif tersebut dihapus dan menjadi bagian dalam wilayah kabupaten, selain itu 3 kabupaten memindahkan pusat pemerintahan ke wilayahnya sendiri, yaitu Kabupaten Magelang, Kabupaten Tegal dan Kabupaten Pekalongan (www.wikipedia.org)

G. Rerangka Pemikiran

Penelitian ini bertujuan menguji ada/tidaknya pengaruh *revenue*, *expenditure*, *real estate*, *capital*, *taxes*, *grant*, *population* dan *tourist* terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Jawa Tengah yang dinyatakan dengan rasio kemandirian, rasio efisiensi, dan rasio efektivitas. Kerangka pikir dalam penelitian ini dapat dijelaskan dengan gambar di bawah.



Gambar 1
Kerangka pikir penelitian

H. Hipotesis

1. Pengaruh *Revenue* Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Revenue merupakan pendapatan pemerintah daerah yang digunakan sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan di daerah (Suyono, 2010). *Revenue* yang digunakan dalam penelitian ini, mengacu pada penelitian sebelumnya, adalah pendapatan asli daerah (PAD). Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang benar-benar berasal dari kemampuan pemerintah daerah sehingga memberi gambaran tentang kekuatan dan kemampuan pemerintah daerah tersebut dalam penyediaan dana bagi pembangunan di daerah bersangkutan (Suyono, 2010).

Revenue mempunyai pengaruh terhadap kemampuan pemerintah untuk menghasilkan kinerja keuangan (Steven dan McGowen, 1983). Jumlah *revenue* yang besar memungkinkan pemerintah untuk melakukan program kerja pemerintah daerah secara lebih leluasa sehingga mampu memberikan pelayanan yang bermutu bagi publik. Suyono (2010) memperoleh bukti empiris bahwa *revenue* pemerintah daerah di Indonesia berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Suatu pemerintah daerah yang mampu mencapai jumlah pendapatan daerah yang tinggi tentunya akan mempunyai jumlah kas tersedia yang cukup untuk melakukan pembiayaan kegiatan program kerja yang telah dianggarkan oleh pemerintah daerah yang bersangkutan.

Berdasarkan teori tersebut diatas, maka hipotesis pertama dalam penelitian ini dapat dinyatakan sebagai berikut:

Ha₁: Terdapat pengaruh *revenue* terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

2. Pengaruh *Expenditure* Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Expenditure merupakan jumlah pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam suatu periode tertentu (Suyono, 2010).

Pengeluaran dalam pemerintah daerah ini disebut sebagai belanja. Belanja yang dilakukan pemerintah daerah terbagi menjadi dua jenis, yaitu belanja rutin dan belanja modal (Mardiasmo, 2007). Halim dan Damayanti (2008) dalam Suyono (2010) menyatakan bahwa jumlah belanja modal yang tinggi mengindikasikan bahwa pemerintah daerah lebih banyak melakukan pengeluaran untuk asset jangka panjang sehingga dampak pada kinerja pemerintah daerah akan dirasakan pada beberapa tahun setelah terjadi belanja modal tersebut.

Adanya pengaruh *expenditure* terhadap kinerja keuangan pemerintah juga telah dibuktikan oleh Steven dan McGowen (1983). Menurut Steven dan McGowen (1983) semakin besar atau tinggi jumlah *expenditure* pemerintah daerah mengindikasikan bahwa pertumbuhan pembangunan pemerintah daerah tinggi sehingga ada upaya pemerintah untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur dalam penyediaan pelayanan bagi masyarakat. Atas dasar uraian di atas, maka hipotesis kedua dalam penelitian ini dapat dinyatakan sebagai berikut:

Ha₂: Terdapat pengaruh *expenditure* terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

3. Pengaruh *Real Estate* Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Real estate adalah aktiva yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang terdiri dari tanah, jalan dan bangunan yang digunakan oleh pemerintah daerah dalam menghasilkan jasa pelayanan bagi masyarakat di daerah bersangkutan (Suyono, 2010). Semakin baik dan semakin banyak jumlah *real estate* yang dimiliki oleh pemerintah daerah, semakin besar kemampuan pemerintah dalam memberikan pelayan publik yang baik, sesuai dengan standar minimal mutu pelayanan bagi masyarakat. Adanya peningkatan pemberian pelayanan pemerintah kepada masyarakat akan meningkatkan pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah sehingga dapat menciptakan kinerja keuangan yang baik bagi pemerintah.

Worthington dan Dollery (1999) dalam Suyono (2010) memperoleh bukti empiris bahwa jumlah *real estate* berpengaruh terhadap pengeluaran pemerintah daerah dan kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil yang berbeda diperoleh Cohen (2006) yang menyatakan bahwa jumlah *real estate* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Yunani. Hasil penelitian yang diperoleh Cohen (2006) disebabkan oleh adanya kesulitan yang dialami oleh pemerintah daerah di Yunani dalam melakukan pengukuran dan penilaian *real estate* yang disajikan dalam neraca pemerintah daerah di Yunani. Oleh karena adanya kesulitan ini, maka banyak laporan keuangan pemerintah daerah yang tidak menyajikan

atau menyajikan tetapi tidak lengkap sehingga dapat mempengaruhi hasil dalam penelitian Cohen (2006) tersebut.

Atas dasar teori tersebut di atas, maka hipotesis ketiga dalam penelitian ini dapat dinyatakan seperti berikut:.

Ha₃ : Terdapat pengaruh *real estate* terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

4. Pengaruh *Capital* Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Capital atau ekuitas dana merupakan selisih antara jumlah harta dengan jumlah kewajiban yang dimiliki oleh pemerintah daerah (Suyono, 2010). Jumlah *capital* yang tinggi dapat menunjukkan bahwa pemerintah daerah mempunyai dana yang cukup untuk membiayai kegiatan operasional pemerintah daerah sehingga mampu mencapai kinerja keuangan yang tinggi pula. Cohen (2006) melakukan pengujian terkait pengaruh jumlah *capital* atau ekuitas dana pemerintah daerah dengan kinerja pemerintah daerah. Bukti empiris yang diperoleh adalah adanya pengaruh jumlah ekuitas pemerintah daerah dengan kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil berbeda diperoleh Suyono (2010) yang menyatakan bahwa *capital* tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Hasil penelitian yang diperoleh Suyono (2010) mungkin disebabkan penggunaan data dan informasi atas laporan keuangan pemerintah daerah yang mempunyai opini wajar dengan pengecualian. Laporan keuangan dengan opini wajar dengan pengecualian sebagian besar memperoleh pengecualian pada aktiva, hal ini

menunjukkan bahwa aktiva yang disajikan tidak sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.

Atas dasar teori tersebut di atas, maka hipotesis keempat dalam penelitian ini dapat dinyatakan seperti berikut:

Ha₄: Terdapat pengaruh *capital* terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

5. Pengaruh *Taxes* Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Pajak dalam penelitian ini adalah pendapatan pajak baik pajak daerah dan bagi hasil pajak baik bagi hasil pajak daerah provinsi maupun bagi pajak pusat. Pajak yang tinggi yang diperoleh suatu pemerintah daerah dapat menjadi sumber pendapatan bagi pemerintah daerah sehingga dapat digunakan sebagai sumber pembiayaan bagi operasional pemerintah daerah dalam rangka menghasilkan pelayanan jasa pada masyarakat (Suyono, 2010). Bukti empiris terkait pengaruh *taxes* terhadap kinerja diperoleh Steven dan McGowen (1983) yang menyatakan bahwa tinggi rendahnya penerimaan pajak oleh suatu pemerintah daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Atas dasar logika teori tersebut di atas, maka hipotesis kelima dalam penelitian ini dapat dinyatakan seperti berikut:

Ha₅: Terdapat pengaruh *taxes* terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

6. Pengaruh *Grant* Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Grant atau hadiah atau sumbangan atau donasi adalah penerimaan yang diterima oleh pemerintah daerah dari pihak lain tanpa adanya tuntutan apapun (Suyono, 2010). Jumlah *grant* yang tinggi yang diterima oleh pemerintah akan dapat menjadi sumber pembiayaan yang cukup bagi pemerintah daerah hingga mampu menjamin kelancaran kegiatan operasional pemerintah daerah dan mampu menciptakan kinerja keuangan yang baik. Steven dan McGowen (1983) memperoleh bukti empiris bahwa *grant* berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Semakin tinggi jumlah *grant* maka semakin tinggi kinerja keuangan yang mampu dicapai oleh pemerintah daerah bersangkutan. Worthington dan Dollery (1999) dalam Suyono (2010) menyatakan bahwa semakin tinggi jumlah *grant* yang diterima oleh pemerintah daerah semakin tinggi tingkat efisiensi dan tingkat efektifitas kinerja keuangan pemerintah daerah.

Atas dasar logika teori tersebut di atas, maka hipotesis keenam dalam penelitian ini dapat dinyatakan seperti berikut:

Ha₆: Terdapat pengaruh *grant* terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

7. Pengaruh *Population* Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Population yang digunakan dalam penelitian ini adalah keseluruhan jumlah penduduk pada kota atau kabupaten. Pemerintah daerah harus bisa
commit to user

memberikan pelayanan publik yang baik. Jumlah penduduk yang banyak pada satu area tertentu meningkatkan tuntutan terhadap pemerintah untuk memberikan pelayanan publik yang jauh lebih baik lagi. Ugroseno (2006) menyatakan bahwa jumlah penduduk berhubungan erat dengan pajak, bertambahnya jumlah penduduk mengakibatkan objek pajak bertambah luas sehingga penerimaan daerah pun juga meningkat.

Athanasopoulos and Triantis (1998) dalam Cohen (2006) mengindikasikan bahwa kepadatan penduduk terkait dengan kinerja pemerintah daerah. Ketika jumlah penduduk meningkat menyebabkan peningkatan permintaan efisiensi pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan sebaik-baiknya terhadap publik. Cohen (2006) memperoleh bukti bahwa jumlah penduduk mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. Semakin banyak jumlah penduduk, semakin banyak pula tuntutan pada pemerintah daerah atas pelayanan publik yang baik.

Atas dasar teori di atas, maka hipotesis ketujuh dalam penelitian ini dapat dinyatakan sebagai berikut:

Ha₇ : Terdapat pengaruh *population* terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

8. Pengaruh *Tourist* Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Tourist yang digunakan dalam penelitian ini adalah ada tidaknya perkembangan jumlah wisatawan yang berkunjung, baik wisatawan mancanegara atau wisatawan domestik pada satu daerah kota atau

kabupaten.. Semakin banyak wisatawan yang datang berkunjung dan membelanjakan uangnya maka semakin banyak pula pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah. Pendapatan yang diperoleh dari wisatawan tersebut dapat dipergunakan untuk sumber pembiayaan pemerintah daerah. Dengan tercukupinya sumber pembiayaan pemerintah daerah dapat menciptakan pelayanan publik yang semakin baik sehingga dapat meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Cohen (2006) membuktikan bahwa perkembangan *tourist* dalam suatu daerah bisa mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. Atas dasar teori di atas, maka hipotesis kedelapan dalam penelitian ini dapat dinyatakan sebagai berikut:

Ha₈ : Terdapat pengaruh *tourist* terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan studi empiris yang bertujuan untuk memperoleh bukti terkait ada/tidaknya pengaruh *revenue, expenditure, real estate, capital, taxes, grant, tourist* dan *population* terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Jawa Tengah. Data dari penelitian ini diperoleh hanya sekali pada satu batasan waktu antara tahun 2005 sampai tahun 2007 sehingga penelitian ini merupakan penelitian dengan data *cross section*.

B. Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi mengacu pada keseluruhan kelompok orang, kejadian, atau hal minat yang ingin peneliti investigasi (Sekaran, 2006). Populasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan pemerintah daerah baik kabupaten atau kota yang berada di Jawa Tengah, tahun 2005 sampai dengan tahun 2007 yang dipublikasikan melalui *website www.bpk.go.id*.

Sampel merupakan sejumlah anggota yang dipilih dari populasi. Dengan mempelajari sampel, peneliti akan mampu menarik kesimpulan yang dapat digeneralisasikan terhadap populasi penelitian (Sekaran, 2006). Sampel dari penelitian ini diambil dengan teknik *purposive sampling*, yaitu pengambilan sampel menggunakan pertimbangan atau kriteria tertentu

berdasarkan kebijakan dari peneliti. Pertimbangan atau kriteria yang digunakan peneliti dalam penelitian ini disesuaikan dengan kriteria yang dipergunakan Suyono (2010). Kriteria pengambilan sampel tersebut adalah sebagai berikut:

1. Laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten atau kota di Jawa Tengah tahun 2005 sampai dengan tahun 2007 yang dipublikasikan dalam *website* BPK RI, yaitu www.bpk.go.id
2. Laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten atau kota di Jawa Tengah tahun 2005 sampai dengan tahun 2007 dengan opini audit wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*), wajar tanpa pengecualian dengan bahasa atau paragraf penjelas (*unqualified opinion with explanation language*) maupun wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*). Laporan keuangan dengan opini tidak wajar (*adverse opinion*) dan tidak memberi opini (*disclamer opinion*) tidak digunakan dalam sampel penelitian dengan pertimbangan bahwa informasi yang tersaji dalam laporan keuangan tersebut tidak wajar dan tidak dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan oleh pemakai laporan keuangan.
2. Laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten ata kota di Jawa Tengah tahun 2005 sampai dengan tahun 2007 yang mencantumkan seluruh data serta informasi yang diperlukan untuk pengukuran variabel dan analisis data untuk pengujian hipotesis dalam penelitian.

C. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan sumber data yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada (Sekaran, 2006). Sumber data dari penelitian ini salah satunya adalah laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2005 sampai dengan tahun 2007 yang dipublikasikan melalui *website* www.bpk.go.id. Sumber data lain yang dipergunakan adalah data statistik yang dipublikasikan melalui *website* www.jateng.bps.go.id.

D. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

1. Operasionalisasi Variabel

Penelitian ini menggunakan delapan variabel penelitian. Satu variabel, yaitu kinerja keuangan, menjadi variabel dependen. Tujuh variabel menjadi variabel independen, yaitu *revenue*, *expenditure*, *real estate*, *capital*, *taxes*, *grant*, *population*, dan *tourist*. Variabel-variabel tersebut untuk selanjutnya akan diuji secara sistematis.

2. Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan. Kinerja keuangan tersebut diwakili dengan menggunakan tiga rasio keuangan pemerintah daerah, agar dalam pengambilan kesimpulan tidak bias maka ketiga rasio keuangan tersebut difaktorkan menjadi satu dengan *commit to user*

menggunakan program SPSS versi 16.0. Satu faktor yang diperoleh dari penggabungan tersebut merupakan proksi kinerja keuangan yang selanjutnya digunakan sebagai data untuk variabel dependen penelitian. Tiga rasio keuangan yang digunakan sesuai dengan rasio keuangan yang digunakan oleh Rahardjo (2010) dan Suprpto (2006). Ketiga rasio tersebut adalah sebagai berikut:

1. Rasio Kemandirian (RKM)

Rasio Kemandirian ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah (PAD) dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain. Data yang digunakan dalam perhitungan ini adalah data yang berasal dari laporan neraca pemerintah daerah. Formula untuk menentukan angka rasio ini adalah seperti berikut ini (Halim, 2007).

$$RKM = \frac{PAD}{Bantuan\ Pemerintah\ Pusat / Pr\ ovinsidan\ Pinjaman}$$

2. Rasio Efektivitas (REK)

Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Kedua angka rasio ini ditentukan dengan menggunakan angka dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai mencapai

minimal mencapai 1 atau 100 persen. Untuk menentukan besarnya rasio ini, menurut Halim (2007) formula yang dapat digunakan adalah seperti berikut ini.

$$REK = \frac{\text{RealisasiPenerimaanPAD}}{\text{TargetPenerimaanPADyangDitetapkanBerdasarkanPotensiRiilDaerah}}$$

3. Rasio Efisiensi (RES)

Rasio Efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari satu atau dibawah 100 persen. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemda semakin baik. Menurut Halim (2007) formula untuk menghitung angka rasio ini adalah seperti berikut ini.

$$RES = \frac{\text{BiayaYangDikeluarkanUntukMemungutPAD}}{\text{RealisasiPenerimaanPAD}}$$

3. Variabel Independen

Variabel independen dalam penelitian ini menggunakan variabel independen sebagaimana digunakan oleh Cohen (2006) dan Suyono (2010) yang terdiri dari variabel berikut ini.

a. *Revenue (REV)*

Variabel *revenue* merupakan jumlah pendapatan asli daerah oleh pemerintah daerah dalam suatu periode tertentu. Jumlah pendapatan asli daerah diperoleh dari laporan realisasi anggaran suatu pemerintah daerah (Suyono, 2010). Variabel ini diukur dengan nilai *revenue* atas jumlah pendapatan asli daerah yang tersaji dalam laporan keuangan pemerintah daerah.

b. *Expenditure (EXP)*

Variabel ini diukur dengan jumlah belanja rutin atau belanja operasional pemerintah daerah dalam suatu periode tertentu. Jumlah belanja rutin atau operasional dalam penelitian ini diambil dari jumlah belanja operasional dalam laporan realisasi anggaran pemerintah daerah pada suatu periode tertentu (Suyono, 2010). Variabel ini diukur dengan nilai *expenditure* atas jumlah *expenditure* daerah yang tersaji dalam laporan keuangan pemerintah daerah.

c. *Real Estate (REAL)*

Variabel ini merupakan jumlah keseluruhan atas nilai tanah, gedung atau bangunan dan jalan yang dimiliki dan dilaporkan oleh pemerintah daerah pada tanggal tertentu (Suyono, 2010). Variabel ini diukur dengan nilai *real estate* atas jumlah *real estate* daerah yang tersaji dalam laporan keuangan pemerintah daerah.

d. *Capital (CAP)*

Variabel ini merupakan jumlah ekuitas dana pemerintah pada tanggal tertentu (Suyono, 2010). Variabel ini diukur dengan nilai *capital* atas jumlah ekuitas dana daerah yang tersaji dalam laporan keuangan pemerintah daerah.

e. *Taxes (TAX)*

Variabel merupakan jumlah pajak yang menjadi hak pemerintah daerah dalam suatu periode tertentu (Suyono, 2010). Variabel ini diukur berdasarkan jumlah penerimaan pajak oleh suatu pemerintah daerah yang datanya diambil dari laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah pada periode tertentu. Variabel ini diukur dengan nilai *taxes* atas jumlah pajak daerah yang tersaji dalam laporan keuangan pemerintah daerah.

f. *Grant (GRANT)*

Variabel ini merupakan jumlah sumbangan, donasi, dan hadiah serta subsidi yang diterima oleh suatu pemerintah daerah pada suatu periode tertentu (Suyono, 2010). Variabel ini diukur dengan jumlah sumbangan atau donasi dan hadiah serta subsidi yang diterima oleh pemerintah daerah dalam suatu periode tertentu yang datanya dapat diambil dari laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah. Variabel ini diukur dengan nilai *grant* atas jumlah sumbangan, donasi

dan subsidi serta hibah pemerintah daerah yang tersaji dalam laporan keuangan pemerintah daerah.

g. *Population (POP)*

Variabel ini merupakan jumlah penduduk yang tercatat dan yang ada dalam suatu wilayah tertentu (Ugroseno, 2006). Data dari variabel ini diperoleh dari data Badan Pusat Statistik Jawa Tengah. Variabel ini diukur dengan jumlah orang.

h. *Tourist (TOURIST)*

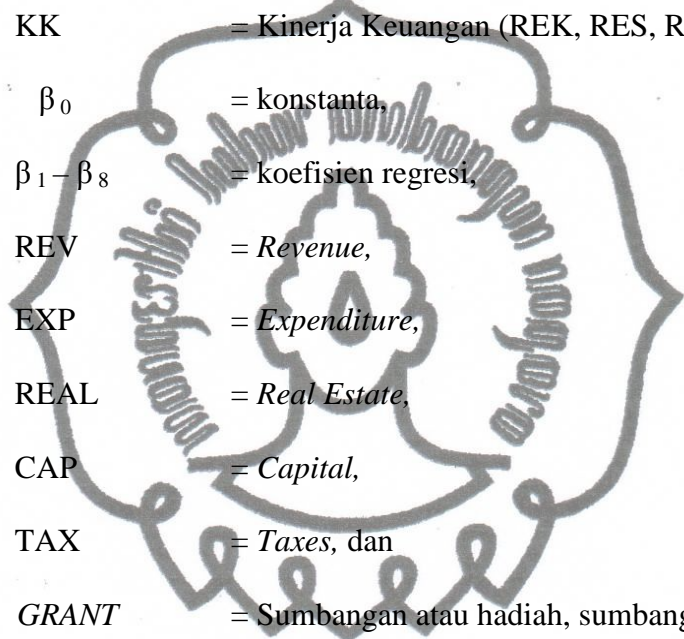
Variabel ini merupakan variabel dummy. Variabel ini dilihat dari peningkatan jumlah wisatawan yang berkunjung tiap tahunnya (Cohen, 2006). Apabila ada peningkatan jumlah pengunjung maka diberi nilai 1, apa bila tidak ada peningkatan atau bahkan terjadi penurunan jumlah pengunjung diberi nilai 0.

E. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model regresi berganda (*multiple regression model*) untuk menguji pengaruh REV, EXP, REAL, CAP, TAX, GRANT, POP, dan TOURIST terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah yang dinyatakan dalam rasio kemandirian (RKM), rasio efisiensi (RES), rasio efektivitas (REK). Model penelitian ini sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{KK} &= \beta_0 + \beta_1 \text{REV} + \beta_2 \text{EXP} + \beta_3 \text{REAL} + \beta_4 \text{CAP} + \beta_5 \text{TAX} + \beta_6 \\
 &\text{GRANT} + \beta_7 \text{POP} + \beta_8 \text{TOURIST} + e
 \end{aligned}$$

Keterangan :



KK	= Kinerja Keuangan (REK, RES, RKM),
β_0	= konstanta,
$\beta_1 - \beta_8$	= koefisien regresi,
REV	= <i>Revenue</i> ,
EXP	= <i>Expenditure</i> ,
REAL	= <i>Real Estate</i> ,
CAP	= <i>Capital</i> ,
TAX	= <i>Taxes</i> , dan
GRANT	= Sumbangan atau hadiah, sumbangan dan subsidi
POP	= <i>Population</i>
TOURIST	= <i>Tourist</i>

F. Pengujian Data

1. Analisis Faktor

Tujuan utama analisis faktor adalah mendefinisikan struktur suatu data matrik dan menganalisis struktur saling berhubungan antara sejumlah besar variabel dengan mendefinisikan satu set kesamaan variabel atau dimensi dan sering disebut dengan faktor (Ghozali, 2006). Dengan analisis

commit to user

faktor peneliti mengidentifikasi dimensi suatu struktur dan kemudian menentukan sampai seberapa jauh setiap variabel dapat dijelaskan oleh setiap dimensi. Analisis faktor menghendaki adanya korelasi yang cukup dalam matriks data agar dapat dilakukan faktor analisis. Cara yang dapat dilakukan agar dapat diketahui bisa tidaknya dilakukan faktor analisis adalah dengan melihat matriks korelasi secara keseluruhan. Untuk menguji apakah terdapat korelasi antara variabel digunakan uji *Bartlett's Test of Sphericity*. Jika nilai uji *Bartlett's Test of Sphericity* signifikan berarti matriks korelasi memiliki korelasi signifikan dengan sejumlah variabel.

2. Uji Asumsi Klasik

Untuk menguji kesalahan model regresi yang digunakan dalam penelitian, maka harus dilakukan pengujian asumsi klasik pada multikolinearitas, heterokedastisitas, autokorelasi serta normalitas.

a. Uji Normalitas Data

Menurut Ghozali (2006), uji normalitas data dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi, residual telah memiliki distribusi normal. Salah satu cara untuk mengetahui apakah residual berdistribusi normal atau tidak adalah dengan menggunakan uji *statistic non parametric Kolmogorov-Smirnov (K-S)*. Dengan uji ini dapat diketahui apakah distribusi nilai-nilai sampel yang teramati terdistribusi normal. Kriteria pengujian dengan dua arah (*two-tailed test*) yaitu dengan membandingkan probabilitas dengan taraf signifikan 0,05. jika $p > 0,05$ maka data terdistribusi normal.

b. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen (Ghozali, 2006). Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen yang lainnya sama dengan nol. Uji multikolinieritas dilakukan dengan melihat *tolerance value* dan *value-inflating factor* (VIF). Nilai yang umum dipakai adalah *tolerance value* 0,10 dan VIF lebih kecil dari 10.

c. Uji Autokorelasi

Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain. Masalah ini timbul karena residual tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya (Suyono, 2010). Salah satu cara untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi adalah dengan alat uji *runs test*. Dari pengujian ini dapat dilihat apakah terjadi autokorelasi atau tidak didasarkan pada nilai *asympt.sig* dalam uji *runs test*. Apabila *asympt. sig.* Lebih besar dari 5%, maka tidak terjadi gejala autokorelasi dan sebaliknya jika *asympt. sig.* lebih kecil 5% maka terjadi gejala autokorelasi dalam model regresi.

d. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali, 2006). Jika *variance* tetap, maka

disebut homokedastis dan jika berbeda disebut heteroskedastis. Salah satu metode dalam menguji heteroskedastisitas dalam model regresi adalah dengan uji *Park*. Metode uji *Park* meregresikan nilai logaritma dari kuadrat residual dengan variabel bebas, dengan tingkat signifikansi 5%, jika nilai signifikansinya di atas 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

3. Pengujian Hipotesis

a. Uji Regresi Simultan (Uji Statistik F)

Uji Simultan (uji F) merupakan pengujian variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian dengan tujuan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama dengan variabel kontrol untuk menghilangkan bias pada pengujian. Uji F ini menggunakan alat analisis yaitu ANOVA (*Analysis of Variances*). Kriteria yang digunakan adalah *probability value (sig)*, apabila *probability value* dalam hasil pengujian lebih kecil dari 5%, maka dapat dinyatakan bahwa model layak (*fit*) untuk digunakan sebagai model regresi dalam penelitian dan sebaliknya jika *probability value* lebih besar dari 5%, maka dapat dinyatakan bahwa model tidak layak untuk digunakan dalam pengujian hipotesis penelitian.

b. Uji Regresi Parsial (Uji Statistik t)

Merupakan pengujian masing-masing variabel independen yang dilakukan untuk melihat apakah masing-masing variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Uji

signifikansi-t dalam penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi 5%.

1) Ho dalam penelitian ini

Ho₁: tidak terdapat pengaruh *revenue* terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Ho₂: tidak terdapat pengaruh *expenditure* terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Ho₃: tidak terdapat pengaruh *real estate* terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Ho₄: tidak terdapat pengaruh *capital* terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Ho₅: tidak terdapat pengaruh *taxes* terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Ho₆: tidak terdapat pengaruh *grant* terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Ho₇: tidak terdapat pengaruh *population* terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

Ho₈: tidak terdapat pengaruh *tourist* terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

2) Ha dalam penelitian ini:

Ha₁: terdapat pengaruh *revenue* terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Ha₂: terdapat pengaruh *expenditure* terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Ha₃: terdapat pengaruh *real estate* terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Ha₄: terdapat pengaruh *capital* terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Ha₅: terdapat pengaruh *taxes* terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Ha₆: terdapat pengaruh *grant* terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Ha₇: terdapat pengaruh *population* terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

Ha₈: terdapat pengaruh *tourist* terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

3) Kriteria

Ho diterima Ha ditolak; $t_{hitung} < t_{tabel}$

variabel bebas secara individu tidak berpengaruh terhadap variabel terikat.

Ho ditolak Ha diterima; $t_{hitung} > t_{tabel}$

variabel bebas secara individu berpengaruh terhadap variabel terikat.

c. Uji koefisien determinasi

Koefisien determinasi adalah nilai yang menunjukkan seberapa besar variabel independen dapat menjelaskan variabel dependennya. Nilai koefisien determinasi (R^2) dilihat pada hasil pengujian regresi berganda untuk variabel independen berupa *revenue*, *expenditure*, *real estate*, *capital*, *taxes*, *grant*, *population* dan *tourist* serta variabel dependen berupa kinerja keuangan dengan bantuan program SPSS versi 16.0. Karena penelitian ini menggunakan lebih dari satu variabel independen maka penulis menggunakan *Adjusted R Square* ($Adj R^2$) seperti yang dinyatakan oleh Ghazali (2006).

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan diuraikan mengenai deskripsi data, pengujian hipotesis, pembahasan, serta perbandingan dengan penelitian sebelumnya. Pengujian data dalam penelitian ini menggunakan model analisis *multiple regression* yang dibantu dengan *software SPSS for Windows 16.0*.

A. Deskripsi Data

Dalam rangka analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Tengah dilakukan pengumpulan data *revenue* (REV), *expenditure* (EXP), *real estate* (REAL), *taxes* (TAX), *grant* (GRANT), *capital* (CAP), *population* (POP), *tourist* (TOURIST) dan kinerja keuangan pemerintah daerah yang dinyatakan dalam rasio kemandirian (RKM), rasio efektivitas (REK), rasio efisiensi (RES).

Data penelitian ini merupakan data yang tersaji dalam laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Tengah yang telah diaudit oleh BPK RI. Data yang diperlukan diperoleh dari publikasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia melalui www.bpk.go.id tahun 2005 sampai dengan tahun 2007.

Populasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2005 sampai dengan tahun 2007

yang dipublikasikan melalui *website* Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) www.bpk.go.id. Atas populasi tersebut, kemudian ditentukan sampel penelitian dengan menggunakan *purposive sampling*. Dengan menggunakan metode *purposive sampling* dan kriteria-kriteria pengambilan sampel sebagaimana dijelaskan dalam bab sebelumnya, diperoleh jumlah sampel penelitian yang dapat dijelaskan dengan tabel seperti berikut ini.

Tabel 1
Sampel penelitian

Kriteria Sampel	Jumlah
Laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2005 s.d 2007 yang dipublikasikan melalui <i>website</i> BPK RI	99
Laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2005 s.d 2007 yang tidak wajar (<i>adverse</i>) dan tidak beropini (<i>disclamer</i>)	3
Laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2005 s.d 2007 yang tidak disajikan secara lengkap data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian	26
Laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Tengah yang menjadi sampel penelitian	70

Sumber: www.bpk.go.id.

Berdasarkan Tabel sampel penelitian di atas jumlah laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2005 sampai dengan 2007 yang berhasil dikumpulkan melalui *download* di *website* BPK RI adalah sejumlah 99 laporan keuangan. Atas jumlah laporan keuangan tersebut, 3 laporan keuangan mempunyai opini tidak wajar (*adverse opinion*) dan tidak berpendapat (*disclamer opinion*) dan oleh karena itu laporan keuangan tersebut tidak digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini. Laporan keuangan tersebut tidak digunakan karena informasi yang disajikan dalam

laporan keuangan pemerintah daerah dengan opini tidak wajar (*adverse opinion*) dan tidak berpendapat (*disclamer opinion*) tidak sesuai dengan SAP sehingga tidak dapat digunakan dalam pengambilan keputusan oleh pemakai laporan keuangan.

Selain kriteria opini audit BPK atas laporan keuangan pemerintah, penelitian ini juga menggunakan informasi keuangan lain dalam pengukuran variabel independen. Untuk laporan keuangan yang telah memenuhi kriteria pengambilan sampel sebelumnya tetapi tidak mencantumkan informasi untuk pengukuran variabel independen, maka laporan keuangan tersebut tidak digunakan dalam penelitian ini. Jumlah laporan keuangan pemerintah yang tidak secara lengkap menyajikan informasi yang dimaksud sejumlah 26 laporan keuangan pemerintah.

Setelah dilakukan identifikasi dengan menggunakan kriteria pengambilan sampel, maka diperoleh sampel sejumlah 70 laporan keuangan pemerintah daerah yang terdiri dari 32 laporan keuangan pemerintah daerah pada tahun 2005, 20 laporan keuangan pemerintah daerah pada tahun 2006 dan 18 laporan keuangan pemerintah daerah pada tahun 2007.

B. Hasil dan Analisis Data

Penelitian ini menguji pengaruh jumlah *revenue* (REV), *expenditure* (EXP), *real estate* (REAL), *taxes* (TAX), *grant* (GRANT), *capital* (CAP), *population* (POP), dan *tourist* (TOURIST) terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah yang diukur dengan rasio kemandirian (RKM), rasio *commit to user*

efektivitas (REK), rasio efisiensi (RES). Penelitian ini menggunakan alat uji *multiple regression model* dengan menggunakan bantuan *software* komputer untuk statistik berupa *SPSS for windows 16.0*. Selanjutnya diuraikan hasil analisis data penelitian yaitu sebagai berikut.

1. Analisis deskriptif statistik atas data

Bagian ini menggambarkan data yang digunakan dalam penelitian yang terdiri dari nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata (*mean*) dan nilai standar deviasi data. Berikut ini disajikan deskripsi data penelitian.

Tabel 2
Deskripsi Statistik Data Penelitian

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std, Deviation
REK	70	0,7517	4,452	1,124	0,4153669
RES	70	0,1893	12,4659	3,864	3,7134853
RKM	70	0,0446	0,7062	0,126	0,1272052
LogREV	70	10,18	12,47	10,744	0,41958
LogEXP	70	10	12,42	11,105	0,57455
LogREAL	70	11,57	13,12	12,159	0,36389
LogCAP	70	11,68	13,21	12,243	0,33094
LogTAX	70	9,76	12,44	10,788	0,45788
LogGRANT	70	7,93	11,9	10,030	0,61967
LogPOP	70	5,11	7,48	6,002	0,36863
Valid N (listwise)	70				

Sumber: hasil pengolahan data

Tabel diatas menyajikan ringkasan statistik deskriptif untuk setiap variabel yang digunakan dalam penelitian. Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah sampel (N) ada 70, dari 70 sampel ini rasio kemandirian (RKM) memiliki *mean* terendah sebesar 0,126 dengan *standart deviation* 0,1272052. Hasil deskriptif data ini menjelaskan bahwa penyebaran data

berkisar antara 0,126 ditambah dengan 0,1272052 sampai dengan 0,126 dikurangi 0,1272052. Nilai *minimum* atas variabel ini adalah sebesar 0,0446 dan nilai maksimumnya adalah sebesar 0,7062.

Sementara itu, untuk *capital* merupakan variabel dengan rata-rata yang tertinggi. Nilai *minimum* untuk LogCAP adalah sebesar 11,68 dan nilai maksimumnya adalah sebesar 13,21. Nilai rata-rata dan standar deviasi untuk LogCAP masing-masing sebesar 12,243 dan 0,33094 yang mengindikasikan bahwa penyebaran data variabel LogCAP berkisar antara 12,243 ditambah dengan 0,33094 sampai dengan 12,243 dikurangi dengan 0,33094.

2. Analisis Faktor

Penelitian ini menggunakan proksi kinerja keuangan pemerintah daerah dengan tiga rasio, maka untuk kepentingan pengujian model regresi berganda harus diperoleh satu data atas variabel dependen. Untuk tujuan itu, penelitian ini menggunakan analisis faktor untuk membuat *factor scores* dengan menggunakan metode *principal components* sebagaimana dinyatakan Santosa (2002) dalam Suyono (2010). Setelah diperoleh nilai *factor scores*, kemudian digunakan sebagai data variabel independen yaitu kinerja keuangan.

Salah satu cara untuk menentukan dapat tidaknya dilakukan analisis faktor adalah melihat matrik korelasi secara keseluruhan. Untuk menguji apakah terdapat korelasi antara variabel digunakan uji *Bartlett's Test of Sphericity*

(Ghozali, 2006). Jika hasilnya signifikan berarti matrik korelasi memiliki korelasi signifikan dengan sejumlah variabel.

Tabel 3
Analisis Faktor

<i>Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.</i>		0,509
<i>Bartlett's Test of Sphericity</i>	<i>Approx. Chi-Square</i>	8,049
	<i>df</i>	3
	<i>Sig.</i>	0,045

Sumber: hasil pengolahan data

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa nilai KMO sebesar 0,509 telah lebih dari 0,5 dan nilai dari *Bartlett's Test of Sphericity* sebesar 0,045 kurang dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa analisis faktor dapat diteruskan.

3. Uji Asumsi Klasik

Model regresi dalam penelitian dapat digunakan untuk estimasi dengan signifikan dan representatif jika model regresi tersebut tidak menyimpang dari asumsi dasar klasik. Uji asumsi klasik ini terdiri dari normalitas, multikolinearitas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas. Berikut ini dipaparkan hasil uji asumsi klasik atas data yang digunakan dalam penelitian.

a. Uji Normalitas Data

Uji normalitas dilakukan untuk memastikan bahwa hasil analisis yang diperoleh valid dan bisa digunakan sebagai alat prediksi yang baik dan tidak bias. Tujuan dari uji normalitas data adalah untuk menguji apakah dalam model regresi *variable* commit to user mengganggu atau residual memiliki

distribusi normal. Model regresi yang baik adalah model regresi yang memiliki distribusi nilai residual normal atau mendekati normal. Uji normalitas data dalam penelitian ini menggunakan alat uji *Kolmogorov-Smirnov* terhadap data *residual regresi*.

Kriteria yang digunakan adalah pengujian dua arah (*two tailed test*), yaitu dengan membandingkan probabilitas (*p-value*) yang diperoleh dengan tingkat signifikansi 5%. Jika sig. (*p-value*) lebih besar dari 0.05, dapat dikatakan bahwa data tersebut berdistribusi normal dan sebaliknya. Hasil pengujian normalitas dengan *Kolmogorov-Smirnov* dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4
Normalitas Data

		<i>Unstandardized Residual</i>
<i>N</i>		70
<i>Normal Parameters^a</i>	<i>Mean</i>	0.0000000
	<i>Std. Deviation</i>	0.37837793
<i>Most Extreme Differences</i>	<i>Absolute</i>	0.111
	<i>Positive</i>	0.111
	<i>Negative</i>	-0.070
<i>Kolmogorov-Smirnov Z</i>		0.932
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>		0.350

Sumber: hasil pengolahan data

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai *asymp.sig* dalam uji kolmogorov smirnov atas seluruh nilai residu data yang digunakan dalam penelitian ini di atas tingkat signifikansi penelitian 5% yaitu 0,350 atau 35%, sehingga keseluruhan data yang digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini telah terdistribusikan dengan normal.

b. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (Ghozali, 2006). Jika variabel-variabel bebas berkorelasi secara sempurna, maka metode kuadrat terkecil tidak bisa digunakan. Variabel-variabel yang tidak berkorelasi dikatakan *orthogonal*, yang menunjukkan bahwa tidak ada masalah multikolinieritas (Suyono, 2010). Model regresi yang baik adalah model yang tidak terdapat korelasi antara variabel independen atau korelasinya rendah.

Multikolinieritas dapat dilihat dengan nilai *variance inflating factor* (VIF) dan *tolerance*. Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Kriteria yang digunakan dalam pengambilan kesimpulan atas uji multikolinieritas adalah jika nilai *tolerance* lebih besar dari 0.1 (10%) dan nilai *variance inflating factor* lebih kecil dari 10 tidak terjadi multikolinieritas. Sebaliknya, jika nilai *tolerance* lebih kecil dari 0.1 (10%) dan nilai *variance inflating factor* lebih besar dari 10 maka terjadi multikolinieritas.

Berikut ini disajikan hasil uji multikolinieritas dalam model regresi yang digunakan dalam penelitian ini.

Tabel 5
Uji Multikolinieritas

<i>Variable</i>	<i>Tolerance</i>	<i>VIF</i>	Kesimpulan
LogREV	0,154	6,487	Tidak terjadi multikolinieritas
LogEXP	0,637	1,570	Tidak terjadi multikolinieritas
LogREAL	0,058	17,376	Terjadi multikolinieritas
LogCAP	0,050	19,916	Terjadi multikolinieritas
LogTAX	0,229	4,374	Tidak terjadi multikolinieritas
LogGRANT	0,761	1,314	Tidak terjadi multikolinieritas
LogPOP	0,359	2,782	Tidak terjadi multikolinieritas
TOURIST	0,971	1,030	Tidak terjadi multikolinieritas

Sumber: hasil pengolahan data

Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai *tolerance* untuk variabel *real estate* dan *capital* dalam model regresi kurang dari 0,1, yaitu 0,058 dan 0,050, dan nilai *VIF* untuk variabel tersebut lebih besar dari 10, yaitu 17,376 dan 19,916. Hasil pengujian ini mengindikasikan bahwa dalam model regresi yang digunakan dalam penelitian ini terjadi gejala multikolinieritas. Dalam Ghazali (2006) dijelaskan bahwa salah satu cara untuk mengobati adanya multikolinieritas adalah dengan mengeluarkan variable independen yang memiliki nilai korelasi tinggi dari model regresi. Berdasarkan data koefisien korelasi antara variabel independen, nilai korelasi tertinggi adalah variabel *capital* yaitu sebesar 95%, maka dapat dikatakan terjadi multikolinieritas tinggi, sehingga variable *capital* dikeluarkan dari model regresi.

commit to user

Tabel 6
Uji Multikolinieritas setelah CAP dikeluarkan

<i>Variable</i>	<i>Tolerance</i>	<i>VIF</i>	<i>Kesimpulan</i>
LogREV	0,171	5,844	Tidak terjadi multikolinieritas
LogEXP	0,641	1,559	Tidak terjadi multikolinieritas
LogREAL	0,569	1,758	Tidak terjadi multikolinieritas
LogTAX	0,230	4,347	Tidak terjadi multikolinieritas
LogGRANT	0,762	1,312	Tidak terjadi multikolinieritas
LogPOP	0,360	2,776	Tidak terjadi multikolinieritas
TOURIST	0,973	1,027	Tidak terjadi multikolinieritas

Sumber: hasil pengolahan data

Berdasarkan tabel di atas bisa dilihat bahwa nilai *tolerance* untuk keseluruhan variabel independen lebih besar dari 0.1 dan nilai VIF kurang dari 10, hal ini menunjukkan bahwa dalam model regresi penelitian ini tidak terjadi gejala multikolinieritas atau seluruh variabel dalam model-model penelitian ini homoskedastisitas.

c. Uji Autokorelasi

Autokorelasi menunjuk pada hubungan yang terjadi antara anggota-anggota dari serangkaian observasi yang terletak berderetan secara *series* dalam bentuk waktu atau hubungan antara tempat yang berdekatan (Suyono, 2010). Pada penelitian ini alat uji yang digunakan adalah *runs test*.

Ada tidaknya autokorelasi dalam uji *runs test* dapat dilihat berdasarkan pada nilai *asympt.sig*. Apabila *asympt. sig*. Lebih besar dari 5%, maka tidak terjadi gejala autokorelasi dan sebaliknya jika *asympt. sig*. Lebih

kecil 5% maka terjadi gejala autokorelasi dalam model regresi yang digunakan dalam penelitian ini. Berikut ini disajikan hasil uji *runs test* untuk mengindikasikan asumsi autokorelasi dalam model regresi yang digunakan dalam penelitian ini.

Tabel 7
Uji Autokorelasi

	<i>Unstandardized Residual</i>
<i>Test Value^a</i>	-0,05129
<i>Cases < Test Value</i>	35
<i>Cases >= Test Value</i>	35
<i>Total Cases</i>	70
<i>Number of Runs</i>	28
<i>Z</i>	-1,926
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>	0,054

Sumber: hasil pengolahan data

Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai *asymp. sig* dalam uji *runs* atas model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah lebih besar dari 5%, yaitu 5,4%. Hasil ini mengindikasikan bahwa variabel dalam model regresi yang digunakan dalam penelitian ini tidak terjadi gejala autokorelasi.

d. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas merupakan keadaan seluruh faktor gangguan terjadi ketidaksamaan *variance* dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Suyono, 2010). Dalam penelitian ini, uji yang digunakan untuk mendeteksi heteroskedastisitas adalah metode *Park*, yaitu dengan meregresikan logaritma dari nilai kuadrat *absolute residual* dengan variabel bebas. Kriteria yang digunakan adalah: jika parameter beta

signifikan secara statistik maka terjadi heteroskedastisitas dan jika parameter beta tidak signifikan secara statistik maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Tabel 8
Uji Heteroskedastisitas

<i>Variable</i>	<i>sig.</i>	Kesimpulan
LogREV	0,393	Tidak terjadi heteroskedastisitas
LogEXP	0,562	Tidak terjadi heteroskedastisitas
LogREAL	0,413	Tidak terjadi heteroskedastisitas
LogTAX	0,060	Tidak terjadi heteroskedastisitas
LogGRANT	0,098	Tidak terjadi heteroskedastisitas
LogPOP	0,487	Tidak terjadi heteroskedastisitas
TOURIST	0,777	Tidak terjadi heteroskedastisitas

Sumber: hasil pengolahan data

Tabel di atas menunjukkan bahwa parameter beta dalam model regresi yang digunakan dalam penelitian ini tidak signifikan secara statistik, sehingga dapat dinyatakan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam semua model regresi penelitian ini.

4. Uji Hipotesis

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh bukti terkait pengaruh *revenue* (REV), *expenditure* (EXP), *real estate* (REAL), *taxes* (TAX), *grant* (GRANT), *capital* (CAP), *population* (POP) dan *tourist* (TOURIST) terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah yang dinyatakan dalam tiga rasio, yaitu rasio kemandirian (RKM), rasio efektivitas (REK), rasio efisiensi (RES). Dengan menggunakan metode *principal components*, dari ketiga rasio tersebut diperoleh *factor scores* yang kemudian digunakan sebagai data kinerja keuangan dalam pengujian model regresi berganda.

Berikut disajikan hasil pengujian data dengan model regresi berganda untuk mengambil kesimpulan terkait hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini.

a. Uji signifikansi-F

Uji signifikansi-F dilakukan guna menentukan *good of fittest* atau uji kelayakan model regresi untuk digunakan dalam melakukan analisis hipotesis dalam penelitian. Kriteria yang digunakan dalam pengujian ini adalah *probability value (sig)*, apabila *probability value* dalam hasil pengujian lebih kecil dari 5%, maka dapat dinyatakan bahwa model layak (*fit*) untuk digunakan sebagai model regresi dalam penelitian dan sebaliknya jika *probability value* lebih besar dari 5%, maka dapat dinyatakan bahwa model tidak layak untuk digunakan dalam pengujian hipotesis penelitian. Berikut disajikan hasil uji signifikansi-F atas kelima model regresi dalam penelitian ini.

Tabel 9
Uji Signifikansi-F (Kelayakan Model Regresi)

<i>Model</i>	<i>Sum of Squares</i>	<i>df</i>	<i>Mean Square</i>	<i>F</i>	<i>Sig.</i>
1 Regression	59,106	7	8,444	52,911	0,000 ^a
Residual	9,894	62	0,160		
Total	69,000	69			

a. *Predictors: (Constant), TOURIST, LogGRANT, LogEXP, LogREAL, LogTAX, , LogPOP, LogREV*

b. *Dependent Variable: kinerja keuangan*

Sumber: hasil pengolahan data

**Signifikan pada $\alpha = 5\%$*

Tabel 9 menunjukkan bahwa *probability value* atas model regresi yang digunakan dalam penelitian lebih kecil dari tingkat signifikansi penelitian 5% yaitu 0,000 (0%). Hasil ini mengindikasikan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini layak (*fit*) untuk digunakan sebagai model regresi pengujian hipotesis. Hasil ini juga mengindikasikan semua variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap kinerja keuangan.

b. Uji signifikansi-t

Uji signifikansi-t dimaksudkan untuk pengujian pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dalam penelitian sebagaimana dinyatakan dalam hipotesis penelitian ini. Selain untuk menguji pengaruh tersebut, uji ini juga dapat digunakan untuk mengetahui tanda koefisien regresi masing-masing variabel independen sehingga dapat ditentukan arah pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen.

Kriteria pengambilan kesimpulan atas hasil pengujian adalah *probability value (sig)-t*, apabila *probability value (sig)-t* lebih kecil dari 5%, maka dapat dinyatakan bahwa variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen sehingga hipotesis yang diajukan dalam penelitian dapat diterima atau didukung oleh data penelitian, sebaliknya jika *probability value (sig)-t* lebih besar dari 5%, maka dapat dinyatakan bahwa variabel independen tidak

berpengaruh pada variabel dependen dan hipotesis yang diajukan tidak diterima atau tidak didukung oleh data penelitian. Berikut ini disajikan hasil uji signifikansi-t dalam penelitian ini.

Tabel 10
Uji Signifikansi-t

Variabel	Koefisien	t-value	Sig.
KONSTANTA	-2,003	-1,076	0,286
LogREV	-1,924	-6,943	0,000
LoEXP	1,964	18,793	0,000
LogREAL	-0,265	-1,512	0,136
LogTAX	0,032	0,147	0,884
LogGRANT	0,132	1,483	0,143
LogPOP	0,385	1,770	0,082
TOURIST	0,158	1,561	0,124

*signifikan pada $\alpha = 5\%$

sumber: hasil pengolahan data

Tabel di atas menunjukkan hasil pengujian regresi berganda untuk model yang digunakan dalam penelitian ini. Hasil pengujian data di atas mengindikasikan bahwa variabel *revenue* dan *expenditure* berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Tengah. Hasil ini diindikasikan oleh nilai probabilitas untuk variabel *revenue* dan *expenditure* lebih kecil dari tingkat signifikansi penelitian 5%. Sementara itu, untuk variabel yang lain, hasil pengujian mengindikasikan bahwa variabel *real estate*, *taxes*, *grant*, *population*, dan *tourism* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Tengah. Hasil ini dibuktikan dengan nilai probabilitas masing-masing variabel tersebut yang lebih besar dari tingkat signifikansi penelitian 5%.

Hasil pengujian signifikansi-t di atas juga mendasari penyusunan model penelitian yang dapat dirumuskan seperti berikut ini.

$$\begin{aligned} \text{KK} = & -2,003 - 1,924(\text{LogREV}) + 1,964(\text{LogEXP}) - 0,265 \\ & (\text{LogREAL}) + 0,032(\text{LogTAX}) + 0,132(\text{LogGRANT}) + \\ & 0,385(\text{LogPOP}) + 0,158(\text{TOURIST}) + e \end{aligned}$$

c. Uji koefisien determinasi

Koefisien determinasi menyatakan persentase total variasi dari variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam model. Untuk model regresi dengan satu variabel independen koefisien determinasi ditunjukkan oleh nilai *R square* (R^2) dan untuk model regresi dengan menggunakan dua atau lebih variabel independen koefisien determinasi ditunjukkan oleh nilai *adjusted R square* ($\text{adj } R^2$). Penelitian ini menggunakan nilai *adj R²*.

Tabel 11
Uji Koefisien Determinasi

<i>Model</i>	<i>R</i>	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>	<i>Std. Error of the Estimate</i>	<i>Durbin-Watson</i>
1	0,926 ^a	0,857	0,840	0,39947704	1,655

a. Predictors: (Constant), TOURIST, LogGRANT, LogEXP, LogREAL, LogTAX, , LogPOP, LogREV

b. Dependent Variable: FP

sumber: hasil pengolahan data

Hasil pengujian menunjukkan nilai *R square* dan *adj R square* untuk model regresi yang digunakan dalam penelitian ini masing-masing adalah sebesar 0,857 (85,7%) dan 0,84 (84%). Nilai *adj R square* adalah 0,84 (84%) mengindikasikan bahwa variabilitas kinerja

keuangan mampu dijelaskan oleh variabel independen berupa *revenue, expenditure, real estate, taxes, grant, population*, dan *tourist* sebesar 84% dan sisanya sebesar 16% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

5. Pembahasan

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan dengan menguji ada/tidaknya pengaruh *revenue, expenditure, real estate, capital, taxes, grant, population* dan *tourist* terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Jawa Tengah yang dinyatakan dengan rasio kemandirian, rasio efisiensi, dan rasio efektivitas. Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan dapat diketahui terdapat pengaruh *revenue* dan *expenditure* terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil ini didasarkan pada nilai probabilitas untuk variabel *revenue* dan *expenditure* sebesar 0.000 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi penelitian. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa terdapat pengaruh *revenue* terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil ini sesuai dengan hasil penelitian Steven dan McGowen (1983), Groves *et al.* (2001), dan Suyono (2010). Suatu pemerintah daerah yang mampu mencapai jumlah pendapatan daerah yang tinggi akan mempunyai jumlah kas yang cukup untuk melakukan pembiayaan kegiatan program kerja yang telah dianggarkan oleh pemerintah daerah (Suyono, 2010). Hasil penelitian ini juga menunjukkan terdapat pengaruh *expenditure* terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dengan hasil penelitian Steven dan

commit to user

MccGrowen (1983), Groves *et al.* (2001) namun kontradiktif dengan hasil penelitian Suyono (2010). Perbedaan hasil penelitian ini mungkin dikarenakan perbedaan penggunaan rasio untuk penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah. Semakin besar jumlah *expenditure* pemerintah daerah mengindikasikan bahwa pertumbuhan pembangunan pemerintah daerah tinggi sehingga ada upaya pemerintah untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur dalam penyediaan pelayanan bagi masyarakat (Steven dan McGowen, 1983).

Pengujian variabel *real estate, capital, taxes, grant, population* dan *tourist* menunjukkan tidak terdapat pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Jawa Tengah. Hasil ini dapat dilihat dari besarnya probabilitas yang melebihi tingkat signifikansi penelitian. Variabel *real estate* tidak mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah, sesuai dengan penelitian Suyono (2010) namun tidak sesuai dengan penelitian Cohen (2006). Perbedaan hasil penelitian ini kemungkinan disebabkan oleh penggunaan data dan informasi atas laporan keuangan pemerintah daerah yang mempunyai opini wajar dengan pengecualian khususnya untuk nilai atas aktiva yang tersaji dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Atas laporan keuangan yang mempunyai opini wajar dengan pengecualian yang digunakan dalam penelitian ini sebagian besar memperoleh pengecualian pada aktiva, sehingga dapat dinyatakan bahwa aktiva yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah tidak wajar berdasarkan standar akuntansi pemerintah.

Terkait dengan hasil pengujian jumlah *taxes* dan *grant* mengindikasikan bahwa variabel tersebut tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Tengah. Hasil ini kontradiktif dengan penelitian yang dilakukan Steven dan McGowen (1983) dan Groves *et al.* (2001). Hasil pengujian mengindikasikan bahwa jumlah pajak daerah dan *grant* yang diterima oleh pemerintah daerah tidak berpengaruh pada kinerja. Hal ini kemungkinan dapat disebabkan oleh jumlah pajak daerah dan *grant* yang kecil sehingga tidak mampu mendorong pencapaian kinerja keuangan pemerintah daerah. Selain itu, jumlah pajak dan *grant* yang tidak berpengaruh pada kinerja tersebut dapat disebabkan oleh penggunaan hasil pajak dan *grant* yang kurang atau tidak efisien sehingga tidak berpengaruh pada kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Tengah.

Berdasarkan pengujian ini juga dapat diketahui bahwa *population* dan *tourist* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil ini tidak sesuai dengan hasil penelitian Cohen (2006). Perbedaan hasil penelitian ini dengan penelitian sebelumnya mungkin dikarenakan masih banyaknya penduduk yang tidak patuh pajak, penghasilan yang diperoleh masyarakat juga cenderung kecil sehingga tidak termasuk dalam penghasilan kena pajak. Selain itu, pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah daerah belum bisa dirasakan oleh keseluruhan masyarakat. Pertambahan jumlah wisatawan yang berkunjung juga tidak dapat memberikan kontribusi terhadap penambahan jumlah penerimaan yang

commit to user

diperoleh pemerintah daerah. Hal ini mungkin dikarenakan pemerintah daerah belum sepenuhnya mampu mengembangkan sektor pariwisata dan memberikan pelayanan publik secara maksimal, sehingga minat wisatawan untuk berkunjung dan membelanjakan uangnya masih rendah.



BAB V

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

A. Simpulan

Hasil pengujian data dalam penelitian mendasari pengambilan simpulan dalam penelitian terkait nilai faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah di Jawa Tengah. Hasil pengujian mengindikasikan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah yang diprosikan dengan tiga rasio penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah yaitu rasio kemandirian, rasio efisiensi, dan rasio efektivitas dipengaruhi oleh jumlah *revenue* dan *expenditure* pemerintah daerah. Dengan *revenue* yang cukup mengindikasikan bahwa pemerintah daerah mempunyai jumlah dana yang cukup untuk mendanai proses operasional dalam rangka penyediaan jasa pelayanan pada masyarakat sehingga dapat berpengaruh pada kinerja keuangan pemerintah daerah. Jumlah *expenditure* yang mampu memberikan hasil yang maksimal untuk penyediaan jasa pelayanan pada masyarakat dapat berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Hasil pengujian data juga mengindikasikan bahwa jumlah *taxes*, *grant*, dan *real estate* tidak berpengaruh pada kinerja pemerintah daerah. Hasil ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah belum mampu menggunakan hasil penerimaan pajak dan *grant* secara efisien sehingga tidak mampu mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. Selain itu, hasil

ini juga mengindikasikan bahwa pemerintah daerah belum mampu melakukan pengakuan, pengukuran, penilaian serta penyajian *real estate* yang dimiliki oleh pemerintah daerah sehingga jumlah *real estate* tersebut tidak mempengaruhi kinerja pemerintah daerah.

Hasil pengujian data juga mengindikasikan bahwa jumlah *population*, serta *tourist* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan hasil ini dapat diketahui bahwa bertambahnya jumlah penduduk tidak mempengaruhi pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan publik yang jauh lebih baik lagi. Selain itu jumlah penduduk tidak memberikan pengaruh terhadap jumlah penerimaan pemerintah daerah, hal ini mungkin disebabkan masih banyaknya penduduk yang tidak patuh pajak. Selain itu, pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah daerah belum bisa dirasakan oleh keseluruhan masyarakat. Pertambahan jumlah wisatawan yang berkunjung juga tidak dapat memberikan kontribusi terhadap penambahan jumlah penerimaan yang diperoleh pemerintah daerah. Hal ini mungkin dikarenakan pemerintah daerah belum sepenuhnya mampu mengembangkan sektor pariwisata dan memberikan pelayanan publik secara maksimal, sehingga minat wisatawan untuk berkunjung dan membelanjakan uangnya masih rendah.

B. Keterbatasan

Penelitian ini dilakukan dengan beberapa keterbatasan penelitian yang dengan keterbatasan tersebut dapat berpengaruh pada hasil penelitian.

Adapun keterbatasan yang ada dalam penelitian antara lain adalah sebagai berikut.

1. Penelitian ini menguji data tanpa memisahkan ke dalam kriteria tertentu, seperti ukuran daerah dan status daerah, sehingga analisis penelitian terbatas pada pengujian kinerja tanpa meneliti lebih dalam mengenai ukuran daerah dan status daerah.
2. Penelitian ini harus menghilangkan satu variabel independen yaitu *capital* dari model penelitian. Hal ini mungkin dikarenakan sampel yang digunakan dalam penelitian ini terbatas hanya pada pemerintah daerah di Jawa Tengah saja.
3. Penelitian ini juga menggunakan beberapa variabel independen yang telah terbukti tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Variabel-variabel tersebut adalah *taxes*, *grant*, dan *real estate*.
4. Kinerja keuangan dalam penelitian ini hanya mampu dijelaskan oleh variabel independen berupa *revenue*, *expenditure*, *real estate*, *tax*, *grant*, *population*, dan *tourism* sebesar 84% dan sisanya sebesar 16% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

C. Saran

Dari beberapa keterbatasan yang ada dalam penelitian ini, saran yang bisa diajukan untuk memperbaiki penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut.

1. Memisahkan sampel penelitian berdasarkan kriteria tertentu, seperti ukuran daerah dan status daerah, daerah pemekaran atau *non* pemekaran.
2. Menambahkan jumlah sampel, tidak hanya kabupaten/kota di Jawa Tengah.
3. Menambah variabel lain yang memiliki hubungan dengan kinerja keuangan pemerintah daerah.

